

ABSTRAK

Keberadaan dari subkontraktor untuk membantu pekerjaan penyedia jasa yang bersifat spesialis ialah sebuah hal yang wajar dalam sebuah proyek konstruksi terlebih pada proyek-proyek pemerintah salah satunya proyek konstruksi yang diadakan oleh BUMN. Namun dalam pelaksanaannya ditemui berbagai masalah yang merugikan pihak subkontraktor. terkait dengan adanya kerugian tersebut maka haruslah diketahui terkait tanggunggugat dari BUMN sebagai Pengguna Jasa yang memberikan persetujuan terkait keberadaan subkontraktor dalam proyek konstruksinya. Penelitian ini memiliki dua tujuan yakni untuk menganalisa daya mengikat persetujuan BUMN sebagai Pengguna Jasa terhadap perjanjian Penyedia Jasa dan Subkontraktor. Kedua, untuk menganalisa Perlindungan Hukum terhadap BUMN sebagai Pengguna Jasa yang memberikan persetujuan terhadap penunjukan Subkontraktor. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan 4 pendekatan yakni pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ialah daya mengikat persetujuan BUMN sebagai pengguna jasa terhadap perjanjian penyedia jasa dan subkontraktor merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, untuk itu sebelum adanya persetujuan tertulis dari PPK maka subkontrak tidak dapat dilaksanakan. Terkait perlindungan hukumnya maka pada dasarnya BUMN dapat bertanggunggugat melalui Pasal 1365 BW karena tidak adanya hubungan kontraktual yang terjadi antara BUMN dengan subkontraktor, disamping itu juga daya mengikat kontrak antara penyedia jasa dan subkontraktor mengikat hingga pengguna jasa didasari dari BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah sehingga tunduk juga pada ketentuan publik.

Kata kunci : Kontrak Kerja Konstruksi, Tanggung Gugat, BUMN, Subkontraktor

ABSTRACTS

The existence of subcontractors to assist the work of specialist service providers is a natural thing in a construction project in advance of government projects, one of which is a construction project held by a BUMN. However, in its implementation, various problems were encountered that were detrimental to the subcontractor. In connection with these losses, it must be known regarding the liability of the BUMN as a Service User who gave approval regarding the existence of a subcontractor in its construction project. This study has two objectives, namely to analyze the binding power of BUMN as a Service User to the Service Provider and Subcontractor agreement. Second, to analyze the Legal Protection of BUMNs as Service Users who give approval to the appointment of Sub contractors This study is a normative study using 4 conceptual approaches, statute approaches, comparative approaches and approaches. The result of the research is that the binding power of BUMN as a service user to the service provider and subcontractor agreement is an obligation that must be fulfilled, for that, before the written approval from PPK, the subcontract cannot be implemented. Regarding legal protection, the BUMN community can be held accountable through Article 1365 BW because there is no contractual relationship that occurs between BUMN and subcontractors, besides that the binding power between service providers and subcontractors is binding so that service users are based on BUMN adding government hands so that it is also subject to the provisions public.

Keywords : *Construction Contracts, Liability, BUMN, Subcontractors*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat kasihNya sehingga penulisan Tesis ini dapat tercapai dan terselesaikan sesuai dan seturut kehendakNya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak secara mudah terselesaikan tanpa adanya dukungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua penulis, papa Giovanni Melianus TL, S.H.,M.H., serta mama Regina Ch. Cendrawati, S.H., penulis percaya semua hal yang terjadi serta yang bisa penulis raih selama ini, selalu ada doa-doa kecil papa dan mama yang menyertai langkah hidup penulis sekarang dan seterusnya;
2. Saudara dan saudari penulis, koko Ryan Hendrich D.W. S.Hut., S.H serta Michel Aurelia Safira, atas semua *supports* terhadap mimpi-mimpi penulis dan percaya bahwa penulis mampu mewujudkannya;
3. Para sahabat tercinta, Liga, Steve, Verana, Andrew, Talisa, Leviana, Merry, Nadya, Yessy, Sharamitha serta sobat Beswan yang selalu mendorong penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap tahunnya Yujin, Reza, Ariel, Noko, Bitsar, Rico, Elly, Ipin;
4. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H.,M.H.,LL.M. dan Ibu Erni Agustin, S.H.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah dengan sangat sabar membantu dan memberikan saran serta ide kepada penulis dalam penulisan tesis;
5. Bapak Prof. Dr. Yohannes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji, Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., serta Bapak Dian

- Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku penguji, merupakan sebuah kehormatan bagi penulis dapat diuji dan dinyatakan lulus oleh para penguji;
6. Para pimpinan, dosen, ketua serta staff program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah menerima serta membantu penulis dengan sangat baik saat menempuh pendidikan;
 7. Keluarga kecil Magister Kenotariatan FH UNAIR angkatan 2019 kelas pagi, tanpa kalian kehidupan merantau penulis akan sangat membosankan, terimakasih atas segala canda tawa serta memori yang manis selama perkuliahan.

Surabaya, 8 April 2021



SHEANNY SCOLASTIKA, S.H.
NIM. 031914253026